



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
**UNIT KERJA** : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUZDALIPAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 649331

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 1.093.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 493 m<sup>2</sup>/60 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
4. Tanah Seluas 400 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m<sup>2</sup>/64 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 325.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 215.000.000**

1. MOTOR, HONDA NF 100TD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA ACH1M21B04 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA/MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000



5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.  
22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	145.391.687
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.488.391.687
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.488.391.687

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.